

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang penting bagi suatu negara yang terus menerus berkembang. Dalam peningkatan dan pembangunan nasional pemerintah memerlukan suatu penerimaan yang rutin, maka pemerintah menempatkan perpajakan sebagai pengadaan dana yang merupakan perwujudan peran aktif masyarakat. Maka kegiatan pembangunan negara tergantung pada jumlah dari penerimaan negara itu sendiri (Nurmantu, 2005:79). Indonesia merupakan salah satu negara yang pada saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang mana pembangunan tersebut dilakukan dengan tujuan yaitu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur. Awalnya, sumber penerimaan negara Indonesia didominasi oleh sektor minyak dan gas bumi (migas), tetapi sekarang beralih ke sektor non migas yang diharapkan mampu berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu penerimaan utama non migas adalah adalah sektor pajak. Tiap tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menetapkan persentase yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahun. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang penting supaya negara mampu memenuhi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Libarti, 2008:65).

Pemerintah Indonesia harus selalu berupaya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi alam yang tersedia di daerah untuk tujuan pembangunan daerah.

Pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak di berlakukannya otonomi daerah atau kebijakan desentralisasi (Rita, 2013:1).

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dan diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, konsekuensi dari kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah ini adalah pemerintah daerah dituntut untuk harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki (Rita, 2013: 2).

Dengan adanya otonomi daerah, tentu pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari pusat saja akan tetapi juga berasal dari daerahnya sendiri sehingga pemerintah daerah perlu berusaha untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, tentu pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaan pajak daerah karena pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah.

Tentunya, besarnya jumlah penerimaan pajak tidak mungkin lepas dari peran aktif wajib pajak dalam pelaksanaan sistem pemungutan pajak.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah tersebut adalah dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata (Rita, 2013:2). Bandung merupakan kota yang memiliki banyak keindahan alam yang berpotensi untuk dikembangkan. Karena keindahan alam yang dimiliki tersebut banyak masyarakat dari luar Bandung yang ingin mengunjungi Bandung. Sektor pariwisata Kota Bandung merupakan sektor yang paling berpotensi untuk dikembangkan. Selain karena dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Sektor pariwisata kota Bandung akan semakin berkembang apabila jumlah kunjungan wisatawan selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, akan meningkatkan penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utama dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun internasional, tingkat hunian hotel, jumlah objek wisata yang ditawarkan, dan pendapatan perkapita (Rita, 2013:3).

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang mana sering dijadikan salah satu tempat tujuan utama wisata favorit di Indonesia. Apalagi letak Kota Bandung yang tidak jauh dari Jakarta, yang dapat ditempuh hanya dalam

waktu dua jam saja, sering sekali dijadikan alternatif warga Jakarta untuk menghabiskan waktu akhir pekannya apabila mereka bosan dengan suasana Jakarta. Mungkin mayoritas warga Bandung pun tentu sudah paham, karena setiap akhir pekan banyak sekali mobil-mobil dengan plat nomor B menghiasi jalanan Kota Bandung.

Hal lain yang membuktikan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu tujuan utama wisata favorit di Indonesia adalah ditunjukkan dengan penghargaan yang diterima oleh Kota Bandung dalam ajang “*Indonesian Tourism Award*” sebagai kota tujuan wisata terfavorit tahun 2010. (Kompas.com, 2010 dalam Rita, 2013 : 5). Jumlah wisatawan yang mengunjungi Kota Bandung dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Data Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik yang Berkunjung dan Menginap di Kota Bandung Tahun 2008-2012

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	M mancanegara	Domestik	
2008	74.730	1.346.729	1.421.459
2009	168.712	2.928.157	3.096.869
2010	180.603	3.024.666	3.205.269
2011	194.062	3.882.010	4.070.072
2012	158.848	3.354.857	3.513.705

Sumber: <http://bandungkota.bps.go.id/subyek/pariwisata>

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa dari tahun 2008-2011 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung selalu meningkat walaupun pada tahun 2012 mengalami penurunan, tetapi penurunan tersebut tidak terlalu jauh. Dengan banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung tentu ini akan meningkatkan pendapatan di segala bidang usaha yang ada di Kota Bandung, baik objek wisata, hotel, restoran dan lain sebagainya. Peningkatan pendapatan bagi bidang usaha yang ada di kota bandung baik dari sektor perhotelan, sektor restoran, dan lain sebagainya ini akan berdampak pula pada peningkatan pendapatan daerah Kota Bandung. Kota Bandung adalah salah satu kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dalam sepuluh tahun terakhir:

Tabel 1.2.
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung
Tahun 2004–2013
(dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2004	209.923.789.420	214.831.096.007
2005	213.100.251.482	229.645.751.696
2006	238.305.532.000	253.892.993.009
2007	281.981.582.739	291.028.616.137
2008	322.880.537.428	297.398.936.477

2009	283.908.133.020	372.423.970.433
2010	416.051.806.357	440.331.559.083
2011	719.575.563.243	803.663.585.485
2012	934.809.515.372	1.001.806.364.114
2013	1.407.759.106.133	1.442.775.238.323

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak (2014)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama sepuluh tahun terakhir selalu meningkat dan peningkatan tersebut tentunya tidak lepas dari peran serta keragaman potensi pariwisata yang ada di Kota Bandung ditambah dengan tersedianya berbagai fasilitas penunjang pariwisata yang memadai seperti restoran, penginapan, fasilitas rekreasi, yang mana itu semua merupakan aset pariwisata yang dapat menjadi faktor penunjang dalam pengembangan sektor industri pariwisata di Kota Bandung.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih dan Budhi (2014) dengan judul ***“Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pendapatan Asli Daerah”*** yang mana didapat kesimpulan bahwa jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel memiliki pengaruh positif yaitu sebesar 0,902, begitu pula terhadap penerimaan pajak restoran juga berpengaruh positif yaitu sebesar 0,960, namun jumlah kunjungan wisatawan tidak

menunjukkan hubungan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah secara parsial menunjukkan hubungan yang signifikan yaitu sebesar 0,412 dan 0,589.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Suartini dan Suyana (2013) dengan judul ***“Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gianyar”*** dapat disimpulkan bahwa pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gianyar adalah sebesar 2,665 yang mana secara parsial ini menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan, begitu pula pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gianyar menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan yaitu sebesar 3,448, pengaruh pajak hotel dan restoran juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten gianyar yaitu sebesar 8,940.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rita (2013) dengan judul ***“Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2012”*** dapat disimpulkan bahwa pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan, dimana jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap peningkatan pajak hiburan sebesar Rp 799.000 per tahun, peningkatan pajak hotel

sebesar Rp 804.000 per tahun, peningkatan pajak restoran sebesar Rp 897.000 per tahun, dan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp 727.000 per tahun.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan juga hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan penelitian terdahulu di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel?
2. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak restoran?
3. Bagaimana pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?
4. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?
5. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari jumlah kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak restoran.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari jumlah kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

3. Bagi Pengusaha Hotel dan Restoran di Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari para pengusaha hotel dan juga restoran di Kota Bandung agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan karena dapat turut serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur kota Bandung.

4. Bagi Dinas Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu informasi bagi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung guna meningkatkan sumber-sumber pajak yang potensial sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap pendapatan daerah Kota Bandung.